

Artikel Ilmiah Wiwik Anggraeni (2).pdf *by* Cek Turnitin

Submission date: 19-May-2026 03:33PM (UTC+0900)

Submission ID: 2963872528

File name: Artikel_Ilmiah_Wiwik_Anggraeni_2_.pdf (1.08M)

Word count: 10437

Character count: 69334

The Effectiveness of the Sidoarjo Financial Information System (SIKSDA) in Improving Regional Financial Management Performance in the Regional Financial and Asset Management Agency of Sidoarjo Regency

[Efektivitas Sistem Informasi Keuangan Sidoarjo (SIKSDA) dalam Meningkatkan Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidoarjo]

Wiwik Anggraeni¹⁾, Ilmi Usrotin Choiriyah²⁾

¹⁾ Program Studi Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

²⁾ Program Studi Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

Email Penulis Korespondensi: ilmiusrotin@umsida.ac.id

Abstract. This study aims to analyze the effectiveness of the Sidoarjo Financial Information System (SIKSDA) in improving regional financial management performance at the Regional Financial and Asset Management Agency (BPKAD) of Sidoarjo Regency. This study employed a descriptive qualitative approach, with data collected through interviews, observations, and document analysis, including the 2024 Government Agency Performance Report (LKJIP). The analysis is based on Duncan's organizational effectiveness theory as cited by Richard M. Steers, covering goal achievement, integration, and adaptation. The results show that in the goal achievement dimension, SIKSDA improves the accuracy, timeliness, and efficiency of financial reporting in accordance with Government Accounting Standards. In the integration dimension, SIKSDA has been integrated with several supporting systems such as Bank Jatim, LPSE, and BSrE, although integration with the Regional Asset Management Information System (SIM BMD) is not yet fully optimal. In the adaptation dimension, BPKAD of Sidoarjo Regency demonstrates good adaptability through system updates, user training, and periodic evaluations of operational constraints. Overall, SIKSDA contributes significantly to improving regional financial management performance.

Keywords - SIKSDA, effectiveness, financial management performance, BPKAD

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan efektivitas Sistem Informasi Keuangan Sidoarjo (SIKSDA) dalam meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah di BPKAD Kabupaten Sidoarjo. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi, termasuk LKJIP Tahun 2024. Analisis didasarkan pada teori efektivitas organisasi Duncan yang dikutip oleh Richard M. Steers, meliputi pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada dimensi pencapaian tujuan, SIKSDA mampu meningkatkan akurasi, ketepatan waktu, dan efisiensi pelaporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan. Pada dimensi integrasi, SIKSDA telah terhubung dengan beberapa sistem pendukung seperti Bank Jatim, LPSE, dan BSrE, meskipun integrasi dengan SIM BMD belum sepenuhnya optimal. Pada dimensi adaptasi, BPKAD Kabupaten Sidoarjo menunjukkan kemampuan penyesuaian yang baik melalui pembaruan sistem, pelatihan pengguna, serta evaluasi berkala terhadap kendala operasional. Dengan demikian, SIKSDA berperan penting dalam meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah.

Kata Kunci - SIKSDA, efektivitas, pengelolaan keuangan daerah, BPKAD.

I. PENDAHULUAN

Pengelolaan keuangan daerah merupakan instrumen strategis dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel [1]. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 menegaskan bahwa pengelolaan keuangan harus dilaksanakan secara tertib, taat peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab [2]. Dalam konteks otonomi daerah, kinerja pengelolaan keuangan menjadi indikator penting untuk menilai kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya publik serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi [3].

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Sidoarjo memiliki peran sentral dalam keseluruhan siklus keuangan daerah, dimulai dari perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan perbendaharaan, penatausahaan, hingga akuntansi dan pelaporan [4]. Kompleksitas pengelolaan keuangan meningkat karena besarnya lingkup layanan yang melibatkan 49 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan nilai anggaran sebesar Rp5,2 triliun pada tahun 2024. Kondisi tersebut menuntut sistem informasi yang bukan hanya sekadar digital, tetapi juga efektif dalam meningkatkan akurasi pencatatan, ketepatan waktu pelaporan, dan efisiensi proses keuangan [5]. Efektivitas merupakan sebagai kemampuan organisasi dalam memperoleh dan menggunakan sumber daya secara optimal untuk

Copyright © Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. This preprint is protected by copyright held by Universitas Muhammadiyah Sidoarjo and is distributed under the Creative Commons Attribution License (CC BY). Users may share, distribute, or reproduce the work as long as the original author(s) and copyright holder are credited, and the preprint server is cited per academic standards.

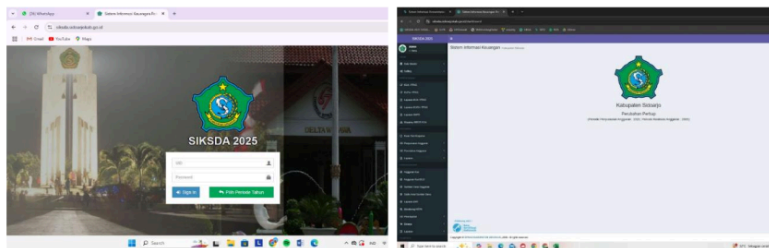
Authors retain the right to publish their work in academic journals where copyright remains with them. Any use, distribution, or reproduction that does not comply with these terms is not permitted.

mencapai tujuan operasional, yang dipengaruhi oleh ketepatan waktu penyelesaian aktivitas, pencapaian tujuan, serta keterlibatan anggota organisasi (Mulyasa, 2002) [6].

Sebagai bentuk digitalisasi keuangan daerah, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo mengembangkan Sistem Informasi Keuangan Sidoarjo (SIKSDA) sejak tahun 2017 [7]. SIKSDA merupakan sistem informasi keuangan daerah yang dikembangkan dan dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo melalui BPKAD, yang pada awalnya berbasis desktop dan kemudian bermigrasi ke versi web pada tahun 2020. Sistem ini mencakup lima modul utama, yaitu: (1) perencanaan anggaran, yang meliputi penyusunan RKA hingga penetapan APBD; (2) pelaksanaan anggaran, yang mencakup penerbitan SPM dan SP2D; (3) penatausahaan keuangan; (4) akuntansi; serta (5) pelaporan keuangan, termasuk fitur otomatisasi Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) yang ditambahkan pada tahun 2024. SIKSDA digunakan oleh seluruh 49 OPD di Kabupaten Sidoarjo dalam satu platform terpadu yang mendukung digitalisasi proses perencanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga pengawasan keuangan secara menyeluruh.

Penerapan SIKSDA sejalan dengan kebijakan nasional terkait Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018, yang bertujuan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Implementasi SIKSDA di BPKAD Kabupaten Sidoarjo menjadi salah satu bentuk penerapan SPBE pada sektor pengelolaan keuangan daerah, karena selain meningkatkan efisiensi pelayanan administrasi, penerapan SIKSDA juga mendukung prinsip interoperabilitas data dan penguatan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik.

Dalam perkembangannya, SIKSDA telah diintegrasikan dengan beberapa sistem eksternal pendukung. Pertama, integrasi dengan Bank Jatim sejak tahun 2018 yang memungkinkan pencairan dana secara *real-time* langsung dari sistem. Kedua, integrasi dengan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) untuk sinkronisasi data kontrak dan pengadaan barang/jasa. Ketiga, integrasi dengan Sistem Pajak Daerah untuk pembaruan data penerimaan daerah. Keempat, penerapan fitur non-tunai dan *paperless* pada tahun 2022 untuk meminimalisir penggunaan dokumen fisik dalam transaksi keuangan. Kelima, integrasi dengan Badan Sertifikasi Elektronik (BSrE) pada tahun 2024 untuk penerapan tanda tangan elektronik pada dokumen SPM dan SP2D. Meskipun demikian, integrasi antara SIKSDA dengan Sistem Informasi Manajemen Barang Milik Daerah (SIM BMD) hingga saat ini belum sepenuhnya terwujud, sehingga pencatatan aset daerah yang berjumlah 483.426 unit masih memerlukan input ganda dan rekonsiliasi manual setiap triwulan oleh seluruh OPD. Kondisi ini menjadi salah satu isu strategis yang diidentifikasi dalam LKJIP BPKAD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024. Secara konseptual, hadirnya SIKSDA dimaksudkan untuk mendorong peningkatan kinerja pengelolaan keuangan daerah melalui tiga indikator utama: (1) akurasi pelaporan keuangan, (2) ketepatan waktu penyampaian dokumen, dan (3) efisiensi proses penatausahaan dan pelaporan. Gambar 1 berikut menunjukkan fitur-fitur utama SIKSDA yang mendukung proses pengelolaan keuangan daerah secara menyeluruh.



Gambar 1. Fitur-fitur utama SIKSDA, termasuk modul perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, penatausahaan, akuntansi, dan pelaporan
(Sumber: Informan yaitu Ibu Ika)

Pengembangan SIKSDA sejalan dengan arah kebijakan nasional yang mendorong pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 menegaskan pentingnya integrasi sistem informasi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan [8], sedangkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 mengamanatkan penyelenggaraan Sistem Informasi Keuangan Daerah berbasis teknologi [9]. Selain itu, landasan teknis penerapan sistem keuangan berbasis akrual mengacu pada Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan [10]. Dengan demikian, penerapan SIKSDA tidak hanya merupakan inovasi internal Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, tetapi juga merupakan respons terhadap tuntutan regulatif.

Tabel berikut menyajikan capaian kinerja BPKAD Kabupaten Sidoarjo pada periode 2021–2024, yang memberikan gambaran umum mengenai tren kinerja pengelolaan keuangan daerah.

Tabel 1. Capaian Kinerja BPKAD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2024

Indikator Kinerja	2021	2022	2023	2024	Target 2024	Capaian (%)
Persentase LKPD sesuai SAP	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Persentase aset terdokumentasi legal	99,50%	99,60%	99,88%	100,04%	99,96%	100,08%
Nilai SAKIP	82,3	82,3 (A)	84,23	84,86	84 (A)	101,02%
Nilai IPP	3,99 (B)	4,03 (A-)	4,05 (A-)	4,05 (A-)	4,07 (A-)	99,50%
Nilai SKM	84,65	96,06	95,50	96,66	97,00	99,64%

(Sumber: Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) BPKAD Kabupaten Sidoarjo, 2024)

Capaian kinerja pengelolaan keuangan daerah menunjukkan hasil yang positif. Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) mencapai 100%, dengan realisasi 49 OPD dari 49 OPD. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) berada pada kategori A dengan skor 84,86, meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 84,23. Persentase aset tetap terdokumentasi legal mencapai 100,04%, melebihi target 99,96%. Nilai Indeks Profesionalitas ASN (IPP) mencapai 4,05 kategori A-, dan nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) mencapai 96,66% kategori Sangat Baik meskipun sedikit di bawah target 97,00%. Capaian tersebut menunjukkan bahwa proses pengelolaan keuangan daerah berada dalam tren positif. Namun demikian, pencapaian hasil akhir tidak serta-merta menggambarkan efektivitas sistem informasi, karena stabilitas pencapaian akurasi, ketepatan waktu, dan efisiensi proses kerja masih bergantung pada keandalan sistem dalam operasional harian.

Observasi lapangan dan temuan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjiP) 2024 mengindikasikan bahwa efektivitas SIKSDA masih menghadapi sejumlah kendala operasional. Beberapa OPD mengalami keterlambatan penyampaian dokumen keuangan akibat proses verifikasi yang belum sepenuhnya otomatis, rekonsiliasi pendapatan dan belanja masih dilakukan secara rutin setiap triwulan, dan masih ditemukan kesalahan input serta pemilahan kode rekening. Selain itu, beban sistem saat peak season menyebabkan perlambatan proses dan antrian transaksi, yang berdampak pada keterlambatan penyelesaian pelaporan. Permasalahan paling krusial adalah belum terintegrasinya SIKSDA dengan Sistem Informasi Barang Milik Daerah (SIM BMD). Padahal, data aset merupakan bagian integral dari laporan keuangan pemerintah daerah. Akibat tidak terhubungnya kedua sistem, terjadi duplikasi input oleh 49 OPD, rekonsiliasi manual, serta tingkat inkonsistensi data yang berpotensi memengaruhi akurasi pelaporan dan efisiensi proses keuangan. Kondisi ini menunjukkan adanya gap antara kondisi ideal yang diharapkan dan kondisi aktual operasional sistem, sehingga efektivitas SIKSDA perlu dianalisis secara menyeluruh.

Selain itu, efektivitas penerapan SIKSDA tidak hanya ditentukan oleh kelengkapan fitur sistem, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor-faktor organisasi dan teknis, seperti kapasitas server, stabilitas jaringan, kompetensi SDM, frekuensi pelatihan, kepatuhan OPD terhadap jadwal pelaporan, koordinasi antar bidang, serta respons adaptif sistem terhadap perubahan regulasi. Faktor-faktor tersebut menentukan apakah SIKSDA dapat berfungsi optimal dalam mendukung pengelolaan keuangan daerah secara menyeluruh.

Efektivitas implementasi SIKSDA membawa dampak langsung terhadap kinerja keuangan. Ketika sistem berjalan optimal, proses pengelolaan keuangan berlangsung lebih cepat, risiko human error berkurang, dan rekonsiliasi data lebih akurat. Sebaliknya, apabila sistem tidak efektif, proses pelaporan menjadi terhambat, duplikasi input meningkat, dan validitas data berpotensi terganggu. Dengan demikian, efektivitas SIKSDA tidak hanya berdampak pada keluaran berupa laporan keuangan, tetapi juga memengaruhi efisiensi dan kualitas siklus kerja pengelolaan keuangan daerah secara keseluruhan.

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji topik efektivitas sistem informasi keuangan daerah, namun dengan fokus dan temuan yang berbeda. Irfianto dan Utami (2013) dalam penelitiannya yang berjudul "Effectiveness of Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) in Gresik Regency" menemukan bahwa penerapan SIPKD berada pada kategori "cukup efektif" dengan tingkat efektivitas 66,8%. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan indikator sistem informasi menurut Bodnar, dan mengidentifikasi kendala utama berupa keterbatasan kapasitas database serta kebutuhan peremajaan teknologi untuk mendukung kinerja sistem. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa digitalisasi sistem pengelolaan keuangan memiliki peran penting dalam meningkatkan efektivitas, namun keberhasilan implementasi sangat bergantung pada kesiapan infrastruktur teknologi [11].

Teken dan Romarina (2024) dalam penelitian berjudul "Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Denpasar" menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk menganalisis pengaruh penerapan SIPD terhadap kinerja pengelolaan keuangan daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan SIPD belum efektif dalam meningkatkan kinerja pengelolaan

keuangan. Faktor-faktor penyebabnya antara lain kurangnya integrasi antar-sistem, frekuensi error aplikasi, respon sistem yang lambat saat peak hours, serta minimnya pelatihan pengguna. Temuan ini mengindikasikan bahwa penerapan sistem informasi tidak secara otomatis menghasilkan efektivitas apabila kesiapan teknis dan kompetensi SDM belum memadai [12].

Penelitian yang dilakukan oleh Firdaus dan Cholik (2024) dalam karya berjudul "Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Bekasi" menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan kerangka teori UTAUT (Unified Theory of Acceptance and Use of Technology). Penelitian tersebut menilai empat aspek, yaitu ekspektasi kinerja, ekspektasi usaha, pengaruh sosial, dan kondisi pemfasilitasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan SIPD di Kota Bekasi belum efektif karena akses aplikasi yang sulit, fitur sistem belum mencakup seluruh siklus pengelolaan keuangan, serta terjadi duplikasi pekerjaan antara SIPD dan sistem internal pemerintah daerah. Temuan tersebut menegaskan bahwa keberhasilan implementasi sistem informasi dipengaruhi oleh kesiapan fitur sistem serta dukungan teknis dalam penggunaannya [13].

Penelitian yang dilakukan oleh Pramudio dan Choiriyah (2022) mengenai penerapan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) di Desa Kebonagung, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teori efektivitas DeLone dan McLean yang mencakup dimensi sumber daya manusia, kualitas sistem, dan kualitas informasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan SISKEUDES mampu membantu meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi pengelolaan keuangan desa. Namun, implementasinya masih menghadapi beberapa kendala, seperti keterbatasan kemampuan sumber daya manusia dalam beradaptasi terhadap pembaruan sistem, gangguan server atau error aplikasi, serta keterlambatan penyajian informasi akibat keterbatasan tenaga kerja. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa efektivitas sistem informasi keuangan pemerintahan tidak hanya dipengaruhi oleh kualitas sistem, tetapi juga kesiapan sumber daya manusia dan kualitas informasi yang dihasilkan [14].

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu tersebut, dapat diketahui bahwa implementasi sistem informasi keuangan pemerintahan memiliki peran penting dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan, baik pada tingkat daerah maupun desa. Namun demikian, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan integrasi sistem, kualitas sistem yang belum optimal, kesiapan infrastruktur teknologi, kompetensi sumber daya manusia, serta minimnya pelatihan pengguna. Penelitian terdahulu juga menunjukkan bahwa efektivitas sistem informasi keuangan dipengaruhi oleh konteks implementasi pada masing-masing instansi pemerintahan. Meskipun demikian, belum terdapat penelitian yang secara khusus mengkaji efektivitas Sistem Informasi Keuangan Sidoarjo (SIKSDA) di BPKAD Kabupaten Sidoarjo, padahal SIKSDA memiliki karakteristik tersendiri, seperti penerapan fitur non-tunai, paperless, integrasi dengan Bank Jatim dan BSRÉ, serta otomatisasi penyusunan Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK). Selain itu, penelitian terdahulu cenderung menilai efektivitas sistem secara umum, sedangkan penelitian ini berfokus pada efektivitas SIKSDA dalam meningkatkan akurasi, ketepatan waktu, dan efisiensi proses pengelolaan keuangan daerah.

Untuk mengisi gap ini, penelitian menggunakan teori efektivitas organisasi Duncan yang dikutip Steers, yang mencakup tiga dimensi: (1) Pencapaian Tujuan (Goal Achievement), untuk mengetahui sejauh mana organisasi mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan; (2) Integrasi (Integration), yang menilai kemampuan organisasi dalam mengintegrasikan berbagai komponen dan subsistem untuk bekerja secara harmonis; dan (3) Adaptasi (Adaptation), untuk mengetahui kemampuan organisasi dalam beradaptasi dengan perubahan lingkungan internal dan eksternal [14]. Dimensi pencapaian tujuan relevan untuk mengetahui sejauh mana SIKSDA mampu meningkatkan akurasi, ketepatan waktu, dan efisiensi proses. Dimensi integrasi digunakan untuk menilai sinkronisasi modul internal dan integrasi antar-sistem seperti SIM BMD. Dimensi adaptasi digunakan untuk melihat kapasitas sistem merespons perubahan regulasi, kebutuhan organisasi, teknologi, dan feedback pengguna. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menilai capaian performa SIKSDA, tetapi juga melihat bagaimana sistem mendukung kinerja secara berkelanjutan.

Penelitian ini penting dilaksanakan karena efektivitas SIKSDA akan menentukan sejauh mana digitalisasi keuangan benar-benar mendukung peningkatan kinerja keuangan daerah secara berkelanjutan. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis bagi BPKAD Kabupaten Sidoarjo dalam strategi pengoptimalan layanan sistem informasi keuangan, serta menjadi rujukan bagi pemerintah daerah lain yang menerapkan sistem serupa.

Berdasarkan uraian tersebut penelitian ini berupaya menjawab pertanyaan mendasar mengenai bagaimana efektivitas implementasi SIKSDA dalam meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah di BPKAD Kabupaten Sidoarjo. Sejalan dengan hal itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas SIKSDA dalam meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah di BPKAD Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan tiga dimensi efektivitas: pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor pendukung dan kendala yang memengaruhi efektivitas implementasi SIKSDA dalam operasional pengelolaan keuangan daerah.

II. METODE

Untuk mengkarakterisasi dan memahami secara menyeluruh efektivitas Sistem Informasi Keuangan Sidoarjo (SIKSDA) dalam meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKAD) Kabupaten Sidoarjo, penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif deskriptif. Penelitian ini berupaya memperoleh pemahaman yang mendalam dari sudut pandang pelaksana sistem dengan berfokus pada kondisi aktual di lapangan, bebas dari manipulasi variabel [15]. Dalam buku Moleong, Bogan dan Tylor menggambarkan penelitian kualitatif sebagai hasil sumber kata tertulis yang menghasilkan data deskriptif dan dapat dilihat oleh peneliti sebagai permasalahan yang ingin diselidiki (Fahri & Nasution, 2021, p. 36) [16].

Teknik penentuan informan dilakukan secara purposive sampling, yaitu pemilihan informan berdasarkan kriteria tertentu yang dianggap relevan dengan tujuan penelitian [17]. Informan yang dipilih merupakan pegawai BPKAD Kabupaten Sidoarjo yang terlibat langsung dalam penggunaan SIKSDA, staf pengoprasian SIKSDA, pengolah data perbendaharaan, dan pengelola laporan keuangan. Mereka dinilai memiliki pemahaman dan pengalaman langsung terhadap implementasi SIKSDA dalam proses pengelolaan keuangan daerah.

Data dalam riset ini terdiri dari data primer dan sekunder [18]. Data primer diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur dengan narasumber utama serta pengamatan langsung terhadap implementasi SIKSDA. Sementara itu, data sekunder berasal dari dokumen resmi, seperti Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dan dokumen pendukung terkait kebijakan serta implementasi sistem. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk memperoleh informasi yang komprehensif serta memperkuat hasil temuan [19].

Proses analisis data menerapkan model analisis interaktif Miles dan Huberman yang terdiri dari empat fase utama: pertama, pengumpulan data (mencari dan mengumpulkan data-data terkait); kedua, reduksi data (proses pemilihan dan penyederhanaan informasi); ketiga, penyajian data (disajikan dalam format narasi maupun tabel); dan empat, menarik kesimpulan serta verifikasi (guna memvalidasi akurasi temuan) [20]. Dalam upaya memastikan validitas data, peneliti menerapkan teknik triangulasi sumber dengan cara mengomparasi informasi yang diperoleh dari wawancara, pengamatan, dan dokumentasi, serta melakukan diskusi hasil temuan bersama rekan sejawat sebagai langkah menjaga objektivitas dan kredibilitas hasil riset.

Sebagai dasar pelaksanaan, penelitian ini menggunakan kerangka operasional konsep yang mengacu pada teori efektivitas organisasi dari Duncan dalam Richard M. Steers. Terdapat tiga dimensi yang digunakan untuk mengukur efektivitas implementasi SIKSDA, yaitu: (1) Pencapaian Tujuan, yang mencakup indikator kurun waktu, dasar hukum, strategi, dan efisiensi pelaporan keuangan; (2) Integrasi, yang mencakup prosedur kerja dan perencanaan terkoordinasi; serta (3) Adaptasi, yang mencakup ketersediaan sarana dan prasarana serta kemampuan sistem dalam menyesuaikan diri dengan perubahan regulasi dan lingkungan organisasi.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan data dan informasi yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, peneliti memperoleh hasil pembahasan mengenai efektivitas implementasi Sistem Informasi Keuangan Sidoarjo (SIKSDA) dalam meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah di BPKAD Kabupaten Sidoarjo periode 2021–2024. Pembahasan dalam penelitian ini dianalisis menggunakan teori efektivitas organisasi Duncan yang dikutip oleh Richard M. Steers, yang meliputi dimensi pencapaian tujuan (goal achievement), integrasi (integration), dan adaptasi (adaptation). Adapun hasil dan pembahasan penelitian dijelaskan sebagai berikut:

A. Pencapaian Tujuan

Pencapaian tujuan merupakan hasil dari serangkaian proses yang berkelanjutan. Untuk memastikan tercapainya tujuan akhir secara maksimal, diperlukan tahapan yang sistematis, baik dalam bentuk pencapaian target-target kecil maupun dalam bentuk pembagian waktu pelaksanaannya. Faktor penting dalam pencapaian ini mencakup jangka waktu pelaksanaan dan sasaran yang jelas dan terukur. Dalam penelitian ini, pencapaian tujuan diukur dari kurun waktu pencapaian, penyusunan target dan realisasi anggaran, dasar hukum, strategi mencapai tujuan, efisiensi dan akurasi data.

1. Kurun Waktu Pencapaian

Penggunaan SIKSDA versi web sejak tahun 2020 telah memberikan perubahan signifikan dalam hal kecepatan pencapaian target penyusunan laporan keuangan. Sebelumnya, ketika masih menggunakan sistem manual atau SIKSDA versi desktop (2017–2019), proses pengolahan data dan penyusunan laporan memakan waktu cukup lama karena tidak terintegrasi dan harus dilakukan secara manual. Namun sejak migrasi ke versi web yang mendukung integrasi antarunit, waktu yang dibutuhkan untuk menyusun laporan menjadi lebih singkat. Hal ini disebabkan oleh kemampuan sistem untuk menarik data secara otomatis dari berbagai unit terkait. Informan menyatakan bahwa durasi pembuatan laporan tidak bisa ditentukan secara pasti karena bergantung pada jenis data, namun secara umum waktu yang dibutuhkan jauh lebih singkat dibandingkan sebelumnya. Ini menunjukkan bahwa dari aspek waktu, sistem telah mendukung pencapaian tujuan organisasi secara efisien.

"Dulu kalau buat laporan butuh waktu lama karena datanya harus diolah manual satu-satu. Sekarang dengan SIKSDA, data bisa langsung ditarik dari sistem dan disusun otomatis. Ini benar-benar mempercepat pekerjaan kami." – Informan 1 (Staf Akuntansi).

Pernyataan ini menunjukkan bahwa sistem telah mampu mempercepat proses pelaporan, mengurangi beban kerja pegawai, dan meningkatkan produktivitas harian. Efisiensi waktu ini juga berdampak langsung pada keepatan pimpinan dalam merespons laporan keuangan dan mengambil kebijakan strategis.

Transformasi digital melalui SIKSDA versi web secara signifikan meningkatkan efisiensi waktu. Hal ini dimungkinkan berkat fitur otomatisasi seperti ekstraksi data antar unit, eliminasi input ganda, dan validasi sistem yang mengurangi kesalahan administratif. Meski durasi pelaporan bervariasi tergantung kompleksitas data, informan menegaskan waktu yang dibutuhkan kini jauh lebih singkat dibanding sebelumnya. Efisiensi ini berdampak strategis: mempercepat pengambilan keputusan, memungkinkan staf fokus pada tugas analitis, dan memastikan kepatuhan terhadap tenggat regulasi pusat.

2. Penyusunan Target dan Realisasi Anggaran

SIKSDA mendukung penyusunan dan pemantauan APBD secara sistematis dan real-time, sehingga pengambilan keputusan lebih akurat dan berbasis data. Menurut informan, ketepatan penyusunan APBD menjadi indikator utama keberhasilan internal BPKAD. Hal ini menunjukkan kontribusi langsung SIKSDA terhadap pencapaian tujuan pengelolaan keuangan daerah, sebagaimana tercermin dalam LKJIP BPKAD 2024 yang mencatat peningkatan kualitas realisasi anggaran.

Berdasarkan hasil wawancara, informan menjelaskan bahwa penggunaan SIKSDA telah memberikan kemudahan signifikan dalam keseluruhan proses siklus anggaran, mulai dari tahap perencanaan hingga pemantauan realisasi anggaran secara real-time. Sistem ini memungkinkan pengguna untuk melakukan penyesuaian cepat terhadap perubahan, serta memberikan visibilitas yang lebih baik terhadap deviasi anggaran. Salah satu informan menyampaikan:

"SIKSDA sangat membantu kami dalam menyusun dan memantau anggaran. Mulai dari perencanaan, penginputan RKA, sampai realisasi APBD, semuanya bisa kami pantau langsung dari sistem. Jadi kalau ada deviasi atau perubahan anggaran, kami bisa cepat tahu dan langsung menyesuaikan. Ini sangat mempermudah pengambilan keputusan oleh pimpinan." – Informan 2 (Pengolah Data Perbendaharaan).

Pernyataan tersebut menegaskan bahwa implementasi SIKSDA tidak hanya mempercepat proses anggaran, tetapi juga meningkatkan ketepatan dalam perencanaan dan pelaporan. Real-time monitoring serta dashboard analitik yang tersedia dalam sistem mendukung transparansi dan efisiensi kerja organisasi, khususnya dalam pengambilan keputusan strategis oleh pimpinan BPKAD.

Dalam praktiknya, SIKSDA memfasilitasi proses penyusunan APBD yang lebih akurat melalui beberapa mekanisme: (a) integrasi data historis yang memungkinkan proyeksi yang lebih presisi, (b) real-time monitoring yang memberikan visibilitas terhadap tingkat realisasi anggaran, dan (c) automated reporting yang mempercepat proses evaluasi kinerja fiskal.

Tabel 2. Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran serta Tingkat Efisiensi Tahun 2024

Sasaran	Indikator	Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	% Kinerja	Target	Realisasi	% anggaran	
				a	b	c	(ab): c/(ab)*100%	
SASARAN 1 Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang sesuai ketentuan dan akuntabel	indikator 1 = Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang sesuai SAP	100,00%	100,00%	100,00%	654.876.632.724	646.056.991.341	98,65%	1,35%
	indikator 2 = Persentase aset tetap terdokumentasi legal	99,96%	100,04%	100,08%	3.748.635.158	3.338.697.632	89,06%	11,01%
SASARAN 2 Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Perangkat Daerah	indikator 1 (Nilai SAKIP)	84,00%	84,86%					
	indikator 2 (Nilai IPP)	4,04	4,05	100,04%	18.915.921.861	18.094.097.468	95,66%	4,38%
	indikator 3 (Nilai SKM)	97	96,6					

(Sumber Data: Laporan Keuangan, Laporan BMD dan Laporan Realisasi Anggaran (dalam LKJIP 2024))

Berdasarkan Tabel 2, dapat diketahui bahwa capaian kinerja pengelolaan keuangan dan aset daerah di BPKAD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024 menunjukkan hasil yang sangat baik. Pada Sasaran 1, indikator persentase laporan keuangan perangkat daerah yang sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) mencapai realisasi sebesar 100% dari target yang telah ditetapkan, dengan tingkat efisiensi anggaran sebesar 1,35%. Hal tersebut menunjukkan bahwa proses pengelolaan dan pelaporan keuangan daerah telah berjalan optimal dan sesuai ketentuan yang berlaku. Selain itu, indikator persentase aset tetap terdokumentasi legal juga melampaui target dengan capaian 100,04% dan tingkat efisiensi sebesar 11,01%.

Pada Sasaran 2, kualitas penyelenggaraan pemerintahan perangkat daerah juga menunjukkan capaian yang baik. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) mencapai 84,86% atau melampaui target sebesar 84%, dengan tingkat efisiensi anggaran sebesar 4,38%. Sementara itu, nilai Indeks Pengelolaan Pemerintahan (IPP) mencapai 4,05 dari target 4,04, serta nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) mencapai 96,6 dari target 97. Capaian tersebut menunjukkan bahwa implementasi SIKSDA mendukung efektivitas pengelolaan keuangan daerah melalui penyediaan data yang lebih akurat, terintegrasi, dan mudah dipantau secara real-time.

Data tersebut juga memperlihatkan bahwa penggunaan SIKSDA berkontribusi dalam meningkatkan ketepatan penyusunan dan pemantauan anggaran daerah. Melalui sistem yang terintegrasi, proses perencanaan, penginputan, hingga evaluasi realisasi anggaran dapat dilakukan secara lebih cepat dan sistematis, sehingga mempermudah pengambilan keputusan oleh pimpinan BPKAD Kabupaten Sidoarjo.

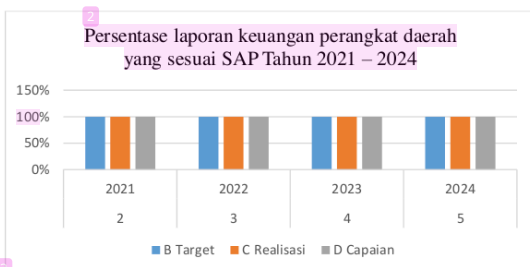
3. Dasar Hukum

SIKSDA dikembangkan dan dioperasikan berdasarkan regulasi nasional, khususnya Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan serta berbagai aturan teknis lainnya. Hal ini ditegaskan oleh Informan bahwa seluruh modul yang terdapat dalam SIKSDA telah disesuaikan dengan peraturan Kemendagri. Sistem ini tidak memerlukan SOP tambahan karena alur kerja sudah mengikuti pakem dari pemerintah pusat. Ini menunjukkan bahwa aspek legalitas dan kesesuaian dengan dasar hukum telah terpenuhi.

Berdasarkan hasil wawancara, informan menyatakan bahwa semua alur dan modul yang tersedia dalam SIKSDA telah disesuaikan dengan aturan dan pakem yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri. Tidak diperlukan Standar Operasional Prosedur (SOP) tambahan, karena sistem kerja sudah sepenuhnya mengikuti regulasi yang berlaku. Dalam hal ini, informan menyampaikan:

"Kami tidak buat SOP karena sistem kerja kami sudah sesuai dengan Kemendagri. Sudah ada pakemnya."—
Informan 1 (Staf Akuntansi).

Hal ini menunjukkan bahwa SIKSDA telah dibangun dengan prinsip compliance yang kuat, sehingga pengguna dapat melaksanakan tugas pengelolaan keuangan sesuai ketentuan tanpa perlu khawatir melanggar peraturan. Kesesuaian ini juga menjadi dasar penting dalam menjamin keabsahan laporan keuangan yang dihasilkan melalui sistem.



Gambar 2. Tren Realisasi dari (IK) Indikator Kinerja Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang sesuai SAP Tahun 2021 – 2024

(Sumber Data: LKjIP BPKAD Kabupaten Sidoarjo 2024)

Berdasarkan Gambar 2, dapat diketahui bahwa persentase laporan keuangan perangkat daerah yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) pada periode 2021–2024 menunjukkan capaian realisasi yang stabil dan konsisten mencapai target. Capaian tersebut menunjukkan bahwa implementasi SIKSDA mampu mendukung proses penyusunan laporan keuangan daerah agar sesuai dengan ketentuan regulasi yang berlaku.

khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Stabilitasnya realisasi indikator tersebut juga menunjukkan bahwa sistem yang digunakan telah mendukung kepatuhan administrasi dan akuntansi keuangan daerah secara lebih sistematis dan terstandarisasi.

4. Strategi Mencapai Tujuan

Strategi pencapaian tujuan dalam implementasi SIKSDA dilakukan melalui pelatihan internal dan penyegaran kompetensi. Setiap kali ada pengembangan menu baru atau perubahan regulasi, pegawai yang terkait akan diundang untuk mengikuti pelatihan atau sosialisasi. Di samping itu, pendekatan informal seperti transfer knowledge antarpegawai juga dilakukan untuk memastikan setiap pengguna sistem memahami cara kerja SIKSDA. Strategi ini dinilai efektif dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi karena memperkuat kemampuan individu dalam menggunakan sistem.

Dalam wawancara, informan menyampaikan bahwa setiap terjadi pembaruan sistem atau perubahan regulasi dari pemerintah pusat, pegawai yang berkaitan akan mendapatkan pelatihan atau sosialisasi secara langsung. Tidak hanya itu, pengetahuan mengenai sistem juga disebarluaskan melalui pendekatan antarindividu di lingkungan kerja. Strategi ini dinilai efektif dalam meningkatkan pemahaman dan keterampilan operasional pengguna.

"Kalau ada peraturan baru dari pusat atau perubahan dalam kebijakan, kami langsung mengadakan pelatihan internal bagi pegawai yang terkait. Ini penting supaya semua orang bisa mengikuti update terbaru dalam sistem dan tidak tertinggal. Dengan cara ini, proses kerja jadi tetap lancar, dan pemanfaatan fitur baru juga bisa langsung diterapkan tanpa menunggu lama."— Informan 1 (Staf Akuntansi)

"Human error itu hal yang sering terjadi, terutama untuk pegawai baru atau saat ada fitur baru yang belum familiar. Tapi kami tidak membiarkan begitu saja. Kami biasanya saling bantu, ngajari, kadang informal aja antarpegawai. Pokoknya sampai mereka benar-benar paham cara pakainya. Jadi, walau ada keterbatasan, kita tetap bisa kerja sama biar sistem tetap berjalan lancar."— Informan 2 (Pengolah Data Perbendaharaan)

Strategi berkelanjutan ini menunjukkan bahwa BPKAD tidak hanya mengandalkan sistem secara teknis, tetapi juga membangun kesiapan SDM agar mampu beradaptasi dengan perkembangan sistem dan regulasi. Pendekatan ini terbukti meningkatkan efektivitas kerja dan akurasi pengelolaan keuangan daerah. Selain itu, komitmen terhadap peningkatan kapasitas internal juga tercermin dari upaya pelatihan yang dilakukan secara periodik sebagai bagian dari agenda penguatan akuntabilitas birokrasi dan kualitas layanan.

Untuk mencapai target kinerja Nilai SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah), Nilai IPP (Indeks Penilaian Pelayanan) dan Nilai SKM (Survey Kepuasan Masyarakat), pada Tahun 2024 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidoarjo telah melakukan beberapa upaya dalam mengungkit kinerja yang diharapkan. Beberapa upaya yang dilakukan yaitu: a. Sosialisasi secara terus menerus tentang reformasi birokrasi SAKIP dan SKM; b. Penyusunan pohon kinerja, untuk memetakan kinerja dan kegiatan utama dalam pencapaian kinerja organisasi dan terdistribusi ke seluruh pegawai; c. Peningkatan kualitas evaluasi internal sehingga dapat memberikan feedback dalam peningkatan kualitas program/kegiatan/sub kegiatan; perencanaan d. Peningkatan kapasitas pegawai secara berkala melalui pelatihan maupun satunya dengan pelaksanaan kegiatan capacity building; pelayanan; f. dan pelaksanaan bentuk peningkatan kompetensi lain secara menyeluruh menyeluruh salah e. Pembuatan sarana dan prasarana penunjang guna peningkatan mutu Melakukan himbauan baik secara personal maupun organisasi/badan/dinas untuk dapat mengisi survey kepuasan Masyarakat yang dilakukan oleh BPKAD.

5. Efisiensi dan Akurasi Data

Efisiensi dan akurasi merupakan dua hal utama yang didapatkan melalui penggunaan SIKSDA. Sistem ini memungkinkan pengambilan data yang lebih cepat, minim kesalahan, dan langsung dapat diolah menjadi laporan. Dengan sistem yang terintegrasi, operator tidak perlu lagi melakukan input data manual berulang kali. Akurasi data meningkat karena sumber data dapat ditelusuri dan divalidasi dengan mudah. Informan menyampaikan bahwa sistem sangat membantu dalam memproduksi laporan yang menjadi bahan pertimbangan pimpinan dalam mengambil keputusan. Hal ini menunjukkan bahwa SIKSDA mampu meningkatkan efektivitas organisasi dari sisi efisiensi dan ketepatan informasi.

"Dulu kami harus input data berkali-kali secara manual untuk setiap unit, dan itu sering menimbulkan kesalahan atau data double. Tapi sejak pakai SIKSDA versi web, proses input jadi jauh lebih cepat karena data sudah terintegrasi. Kesalahan bisa ditekan karena sistem langsung menolak kalau ada yang tidak sesuai format atau logikanya. Ini jelas sangat membantu kami dalam menghasilkan laporan yang lebih akurat dan cepat."— Informan 3 (Pengelola Data Laporan Keuangan).

Dalam penelitian ini, efektivitas pencapaian tujuan melalui penerapan SIKSDA diukur berdasarkan beberapa indikator, yaitu kecepatan dalam penyusunan laporan keuangan, ketepatan dalam penyusunan anggaran, serta kesesuaian dengan peraturan dan dasar hukum yang berlaku. Hasil temuan menunjukkan bahwa sejak diterapkannya SIKSDA versi web pada tahun 2020, proses pelaporan keuangan mengalami percepatan secara signifikan.

dibandingkan sistem sebelumnya, dan akurasi data meningkat tajam berkat sistem validasi dan integrasi data yang diterapkan dalam SIKSDA.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Pramudio dan Choiriyah (2022) mengenai penerapan SISKEUDES di Desa Kebonagung, Kabupaten Sidoarjo, yang menunjukkan bahwa sistem informasi keuangan pemerintahan mampu meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi pengelolaan keuangan. Keduanya menegaskan bahwa digitalisasi sistem keuangan berkontribusi positif terhadap pencapaian tujuan organisasi, khususnya dalam hal akurasi dan ketepatan waktu pelaporan. Hal ini berbeda dengan temuan Teken dan Romarina (2024) mengenai implementasi SIPD di Kota Denpasar, yang menunjukkan bahwa penerapan SIPD belum berjalan efektif karena sistem belum sepenuhnya stabil dan memerlukan waktu adaptasi yang panjang. Fenomena serupa juga ditemukan dalam penelitian Firdaus dan Cholik (2024) mengenai SIPD di Kota Bekasi, di mana kinerja yang diharapkan dari penggunaan aplikasi belum tercapai secara optimal akibat keterbatasan fitur dan berbagai kesulitan teknis. Berbanding terbalik dengan kondisi tersebut, implementasi SIKSDA di Kabupaten Sidoarjo menunjukkan keberhasilan yang signifikan dalam mendukung proses perencanaan dan pelaporan secara lebih terintegrasi, akurat, dan tepat waktu.

B. Integrasi

Integrasi merupakan indikator yang mengukur sejauh mana suatu organisasi mampu menjalin sosialisasi, membangun kesepahaman, serta menjalin komunikasi secara efektif dengan berbagai organisasi lain. Aspek ini mencakup proses interaksi dan penyelarasan antara lembaga dalam mencapai tujuan bersama (M. Richard steers 1999). Dalam penelitian ini, integrasi mencakup prosedur dan analisis perencanaan program.

1. Prosedur

Implementasi SIKSDA telah menciptakan standarisasi prosedur kerja yang comprehensive di seluruh unit BPKAD. Meskipun belum terdapat dokumen SOP formal yang tertulis, sistem telah mengintegrasikan best practices dan standard procedures yang ditetapkan oleh Kemendagri ke dalam workflow automation.

Prosedur kerja yang terintegrasi dalam SIKSDA mencakup seluruh aspek pengelolaan keuangan daerah, mulai dari perencanaan anggaran, pelaksanaan, monitoring, hingga pelaporan. Sistem ini menggunakan proses otomatis yang memastikan setiap tahapan dilakukan sesuai dengan urutan yang benar dan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.

Keunggulan pendekatan ini terletak pada kemampuan sistem untuk menjaga konsistensi secara otomatis, mengurangi variabilitas yang dapat menyebabkan errors atau deviasi dari standar prosedur. Informan menyampaikan bahwa rigid framework yang diadopsi dari Kemendagri justru memberikan kejelasan dan kepastian dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.

"Sebenarnya kita nggak perlu SOP tambahan lagi, karena sistemnya sudah mengikuti aturan Kemendagri. Alurnya sudah otomatis, tinggal ikuti aja urutannya, dari RKA sampai pelaporan, semua terarah." – Informan 2 (Pengolah Data Perbendaharaan).

Selain itu, proses input data ke dalam sistem dilakukan secara bertahap berdasarkan kalender kegiatan pengelolaan keuangan daerah yang telah ditentukan. Hal ini memungkinkan seluruh unit kerja untuk mengikuti ritme kerja yang seragam dan terjadwal, serta mempermudah proses verifikasi data.

"Biasanya setiap awal tahun anggaran, kita sudah punya jadwal input RKA. Nanti dilanjut realisasi bulanan, terus laporan semesteran dan akhir tahun. Semuanya sudah ada tahapannya." – Informan 3 (Pengelola Data Laporan Keuangan).

Penggunaan sistem juga dilengkapi dengan mekanisme validasi otomatis di setiap tahap input, yang membantu pengguna memastikan kelengkapan dan kesesuaian data sebelum masuk ke tahap berikutnya. Prosedur ini tidak hanya memastikan akurasi data, tetapi juga meningkatkan efisiensi waktu dalam pelaporan.

"Kalau ada yang salah input, sistem langsung kasih peringatan. Jadi nggak bisa lanjut ke tahap berikutnya kalau belum diperbaiki. Ini sangat membantu supaya datanya valid semua." – Informan 3 (Pengelola Data Laporan Keuangan).

Hal ini menunjukkan bahwa SIKSDA telah dirancang dengan prinsip *compliance* yang kuat terhadap regulasi pengelolaan keuangan daerah. Alur sistem yang terstruktur sesuai aturan Kemendagri memungkinkan pengguna untuk bekerja secara terarah dan sesuai prosedur tanpa harus menyusun SOP tambahan. Kesesuaian sistem dengan regulasi nasional juga memperkuat legitimasi dan keabsahan dari laporan keuangan yang dihasilkan, sekaligus meminimalkan risiko kesalahan administratif dan pelanggaran prosedural dalam pelaksanaan tugas. Dengan demikian, implementasi prosedur yang tertanam dalam sistem menjadi salah satu faktor kunci dalam menjaga efektivitas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah melalui SIKSDA.

2. Analisis Perencanaan

SIKSDA telah terintegrasi dengan berbagai aplikasi lokal lainnya di Kabupaten Sidoarjo untuk mendukung efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Integrasi ini memungkinkan sinkronisasi data antarunit yang berdampak pada kemudahan dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran, mempercepat aliran informasi, serta meningkatkan akurasi pelaporan.

Informan menyampaikan bahwa integrasi-integrasi ini sangat membantu dalam proses perencanaan dan monitoring:

"Perencanaan sekarang bisa kita pantau langsung dan sistem sudah kasih warning kalau ada angka yang janggal. Itu sangat membantu kita sebelum lanjut ke tahap pelaksanaan." – Informan 2 (Pengolah Data Perbendaharaan)

Tabel 3 berikut menunjukkan gambaran integrasi SIKSDA dengan berbagai sistem pendukung lainnya yang digunakan dalam pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Sidoarjo.

Tabel 3. Integrasi Sistem Informasi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah di BPKAD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024

No	Sistem	Fungsi Utama	Volume Data	Status Integrasi dengan SIKSDA
1	SIKSDA	Pengelolaan keuangan daerah (perencanaan, perbendaharaan, akuntansi)	49 OPD, Anggaran Rp 5,2 T	- (sistem utama)
2	Bank Jatim	Pencairan dana real-time	Seluruh transaksi pencairan	Terintegrasi penuh (2018)
3	Sistem Pajak Daerah	Pengelolaan pendapatan daerah	Data penerimaan pajak	Terintegrasi
4	Aplikasi Pengadaan (LPSE)	Pengadaan barang/jasa	Data kontrak dan pengadaan	Terintegrasi
5	BSrE	Tanda tangan elektronik	SPM dan SP2D	Terintegrasi (2024)
6	SIM BMD	Pengelolaan aset daerah	483.426 unit aset tetap, 2.653 bidang tanah	Belum terintegrasi

(Sumber: Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) BPKAD Kabupaten Sidoarjo, 2024)

Berdasarkan Tabel 3, dapat dilihat bahwa SIKSDA telah terintegrasi dengan lima sistem pendukung, namun masih terdapat satu sistem yang belum terintegrasi sepenuhnya, yaitu SIM BMD. Integrasi yang telah berjalan memberikan dampak positif yang signifikan. Integrasi dengan Bank Jatim yang telah berjalan sejak tahun 2018 memungkinkan pencairan dana secara *real-time*, mengurangi waktu tunggu dan meningkatkan efisiensi perbendaharaan. Integrasi dengan sistem pajak daerah membantu memperbarui data penerimaan daerah secara langsung, yang penting untuk mengatur arus kas dan memperkirakan pendapatan daerah. Sementara itu, keterhubungan dengan aplikasi pengadaan barang/jasa (LPSE) memudahkan pencatatan otomatis kegiatan pengadaan dan pemantauan penggunaan anggaran. Integrasi terbaru dengan BSrE pada tahun 2024 memungkinkan penggunaan tanda tangan elektronik untuk SPM dan SP2D, mendukung sistem *paperless* yang telah dikembangkan sebelumnya.

Penting untuk dipahami bahwa kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan integrasi sistem merupakan dua hal yang berbeda secara teknis maupun regulatif. Kesesuaian dengan SAP merujuk pada pemenuhan prinsip-prinsip akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan, seperti basis akrual, pengakuan pendapatan dan belanja, serta penyajian neraca dan laporan operasional. SIKSDA mampu memenuhi seluruh standar tersebut karena modul akuntansi dan pelaporannya telah dirancang mengikuti ketentuan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 dan PP Nomor 71 Tahun 2010, sehingga laporan keuangan yang dihasilkan dapat diverifikasi dan dipertanggungjawabkan secara hukum. Capaian 100% kesesuaian SAP dari 49 OPD sebagaimana tercatat dalam LKjIP 2024 merupakan bukti bahwa aspek pelaporan keuangan telah berjalan optimal dalam SIKSDA.

Namun demikian, kesesuaian dengan SAP tidak mensyaratkan integrasi teknis antarsistem secara penuh. Integrasi sistem merupakan persoalan arsitektur teknologi informasi yang menyangkut kemampuan dua atau lebih sistem untuk saling bertukar data secara otomatis dan *real-time*. SIKSDA dan SIM BMD dikembangkan secara terpisah dengan platform dan arsitektur yang berbeda, sehingga meskipun laporan keuangan yang dihasilkan SIKSDA telah sesuai SAP, data aset dari SIM BMD tetap harus direkonsiliasi secara manual setiap triwulan. Dengan kata lain, laporan keuangan bisa sesuai SAP meskipun proses pengisian datanya masih dilakukan secara duplikatif, selama hasil akhir rekonsiliasi menunjukkan keselarasan antara catatan keuangan dan catatan aset. Kondisi ini memang tidak ideal dari sisi efisiensi, tetapi tidak serta-merta menggugurkan keabsahan laporan keuangan yang dihasilkan.

Kondisi belum terintegrasinya SIKSDA dengan SIM BMD ini pun diakui oleh informan:

"Untuk aset memang masih ada kendala. Karena SIKSDA belum sepenuhnya terintegrasi dengan SIM BMD, jadi masih ada yang harus diinput dua kali. Kami harus rekonsiliasi manual setiap triwulan untuk memastikan datanya sama. Ini memang menjadi PR kami ke depan." – Informan 3 (Pengelola Data Laporan Keuangan)

2. Kondisi ini sejalan dengan yang tercantum dalam dokumen LKjIP 2024 BPKAD yang menyebutkan bahwa belum terintegrasinya sistem informasi keuangan daerah (SIKSDA) dengan sistem informasi BMD (SIM BMD) masih menjadi salah satu kendala dalam pencapaian efektivitas pengelolaan keuangan dan aset daerah. Duplikasi input data aset oleh 49 OPD dan kebutuhan rekonsiliasi manual tidak hanya mengurangi efisiensi, tetapi juga berpotensi menimbulkan inkonsistensi data antara catatan keuangan dan catatan aset.

Belum terwujudnya integrasi antara SIKSDA dan SIM BMD dipengaruhi oleh beberapa faktor. Pertama, perbedaan arsitektur dan platform sistem. SIKSDA dikembangkan sebagai sistem berbasis web sejak tahun 2017 dan terus mengalami pengembangan, sementara SIM BMD dikembangkan secara terpisah dengan fokus pada pengelolaan aset daerah dan memiliki struktur sistem yang berbeda. Perbedaan ini menimbulkan kompleksitas dalam proses integrasi karena memerlukan pengembangan *Application Programming Interface* (API) atau *middleware* untuk menjembatani kedua sistem. Kedua, keterbatasan sumber daya manusia. BPKAD Kabupaten Sidoarjo memiliki 64 ASN dengan latar belakang yang beragam, namun sebagian besar memiliki kompetensi di bidang akuntansi dan administrasi keuangan, sementara integrasi sistem informasi memerlukan keahlian khusus di bidang teknologi informasi yang jumlahnya masih terbatas. Ketiga, kompleksitas data aset yang harus disinkronkan dengan data keuangan, mengingat Pemerintah Kabupaten Sidoarjo mengelola 483.426 unit aset tetap termasuk 2.653 bidang tanah yang terus bertambah setiap tahunnya. Keempat, prioritas pengembangan sistem yang selama ini lebih diarahkan pada fitur-fitur yang dianggap lebih mendesak, seperti transaksi non-tunai (2018), *paperless system* (2022), integrasi BSrE (2024), dan otomatisasi CaLK (2024), sehingga integrasi dengan SIM BMD belum menjadi prioritas utama hingga saat ini.

Meskipun demikian, upaya integrasi terus dilakukan dan telah menjadi prioritas pengembangan sistem ke depan untuk menyempurnakan siklus pengelolaan keuangan dan aset daerah secara menyeluruh. BPKAD telah memasukkan integrasi penuh SIKSDA-SIM BMD sebagai bagian dari rencana strategis pengembangan sistem informasi dalam periode mendatang.

Secara keseluruhan, SIKSDA terbukti memiliki tingkat efektivitas yang cukup tinggi dalam aspek integrasi, terutama dari sisi prosedural dan integrasi dengan beberapa sistem teknologi pendukung. Dari enam sistem yang diidentifikasi dalam Tabel 3, lima sistem telah terintegrasi dengan baik, mencakup fungsi-fungsi kritis seperti pencairan dana, pengelolaan pendapatan, pengadaan, dan validasi elektronik. Keterpaduan ini mempercepat arus informasi antarunit dan mendukung pengambilan keputusan fiskal yang lebih cepat, tepat, dan berbasis data.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Pramudyo dan Choiriyah (2022) yang menekankan bahwa kualitas sistem merupakan salah satu faktor penentu efektivitas sistem informasi keuangan pemerintahan, di mana kemampuan sistem dalam mengintegrasikan berbagai proses secara otomatis berkontribusi langsung terhadap kelancaran pengelolaan keuangan. Hal ini juga selaras dengan rekomendasi dari penelitian Irfianto dan Utami (2013) terkait implementasi SIPKD di Kabupaten Gresik, yang menekankan pentingnya penguatan sistem dan peningkatan integrasi antaraplikasi untuk menunjang efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Sebaliknya, penelitian mengenai implementasi SIPD di Kota Denpasar dan Kota Bekasi justru menunjukkan kelemahan dalam hal integrasi, di mana SIPD di kedua daerah tersebut belum mampu terhubung secara optimal dengan sistem lain yang dibutuhkan. Dibandingkan dengan kondisi tersebut, SIKSDA di Kabupaten Sidoarjo dapat dikatakan telah memenuhi sebagian besar dimensi integrasi sebagaimana dikemukakan oleh Steers dalam teori efektivitas organisasi, meskipun penyempurnaan pada aspek integrasi pengelolaan aset dengan SIM BMD masih perlu menjadi prioritas ke depan.

C. Adaptasi

Adaptasi merupakan kemampuan organisasi dalam menyesuaikan diri terhadap perubahan dan dinamika lingkungan eksternal maupun internal. Kemampuan ini mencerminkan seberapa fleksibel organisasi dalam merespons tantangan, peluang, serta tuntutan baru yang muncul. Salah satu tolok ukur yang digunakan untuk menilai tingkat adaptasi adalah melalui proses perekrutan dan penempatan tenaga kerja yang tepat, yang mencerminkan kemampuan organisasi dalam memenuhi kebutuhan sumber daya manusia sesuai dengan kondisi dan kebutuhan yang berkembang (Steers, M Richard 1985). Dalam penelitian ini, indikator adaptasi mencakup sarana dan prasarana, monitoring dan evaluasi program, serta kendala dan upaya penanganan.

1. Sarana dan Prasarana

Dalam hal infrastruktur, pelaksanaan SIKSDA masih menghadapi tantangan teknis terkait jaringan internet dan keamanan sistem. Sebagaimana disampaikan oleh Informan, ketika koneksi terganggu atau sistem terkena virus, aplikasi tidak dapat digunakan hingga dilakukan perbaikan oleh pengembang. Meski demikian, sistem pencadangan data dilakukan secara harian (*daily backup*) untuk menghindari kehilangan informasi. Hal ini menunjukkan adanya kesadaran dan upaya adaptif dalam menjaga keberlanjutan operasional sistem meskipun prasarana belum sepenuhnya ideal.

"Kalau jaringan sedang down, aplikasi memang tidak bisa dipakai, tapi data tetap aman karena sudah ada backup otomatis setiap hari. Jadi tidak perlu khawatir kehilangan data." – Informan 2 (Pengolah Data Perbendaharaan).

Berdasarkan dokumen LKjIP 2024, BPKAD mencatat bahwa salah satu kendala yang dihadapi adalah "keamanan jaringan dan server (Server pernah terkena hack)". Insiden keamanan ini menjadi pembelajaran penting bagi BPKAD untuk terus meningkatkan sistem keamanan siber dan infrastruktur teknologi informasi. Meskipun demikian, dengan adanya sistem backup harian, dampak dari gangguan teknis dapat diminimalisir sehingga tidak mengganggu kelangsungan operasional secara signifikan.

2. Monitoring dan Evaluasi Program

Monitoring dan evaluasi merupakan komponen penting dalam memastikan bahwa implementasi SIKSDA berjalan sesuai dengan tujuan dan mampu beradaptasi dengan dinamika kebutuhan organisasi. Dalam konteks ini, BPKAD Kabupaten Sidoarjo telah melakukan upaya evaluasi internal secara berkala terhadap pelaksanaan dan pemanfaatan SIKSDA. Evaluasi dilakukan melalui forum-forum internal, baik secara formal dalam bentuk rapat koordinasi maupun secara informal melalui komunikasi antarunit kerja.

Setiap temuan dari hasil pemantauan, seperti error teknis, hambatan input data, hingga respons pengguna, dijadikan dasar untuk penyempurnaan sistem ke depan. Selain itu, masukan dari pengguna sistem dihimpun secara langsung dan ditindaklanjuti oleh pengembang internal. Hal ini menunjukkan adanya kesadaran organisasi dalam menjaga relevansi dan kinerja sistem melalui mekanisme evaluatif yang adaptif. Upaya ini penting agar SIKSDA tidak hanya berjalan sesuai regulasi, tetapi juga terus berkembang mengikuti kebutuhan pengguna dan perkembangan teknologi informasi. Adaptasi ini mencerminkan fleksibilitas organisasi dalam menyikapi dinamika eksternal dan menunjukkan kemampuan SIKSDA bertransformasi sesuai tuntutan regulasi.

"Biasanya kalau ada kendala dari pengguna, kita catat dan bahas saat rapat mingguan. Kalau memang perlu perbaikan sistem, langsung kita koordinasikan ke pengembangnya." – Informan 3 (Pengelola Data Laporan Keuangan)

3. Kendala dan Upaya Penanganan

Meskipun SIKSDA telah berperan penting dalam mendukung pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Sidoarjo, dalam implementasinya masih ditemukan sejumlah kendala teknis dan administratif yang memengaruhi efektivitas sistem. Berdasarkan hasil wawancara, observasi lapangan, dan telaah dokumen LKjIP Tahun 2024, kendala tersebut terutama berkaitan dengan aspek sumber daya manusia, kapasitas sistem, integrasi aplikasi, serta faktor jaringan dan keamanan.

Kendala yang paling sering muncul adalah keterlambatan penyampaian dokumen keuangan oleh OPD dan kesalahan input data, khususnya dalam pemilahan kode rekening. Hal ini disebabkan oleh belum meratanya pemahaman pengguna terhadap prosedur pengelolaan keuangan berbasis SIKSDA, terutama pada OPD yang mengalami pergantian pegawai. Kondisi ini juga tercermin dalam LKjIP 2024 yang menyebutkan bahwa "tingkat pemahaman penganggaran, penatausahaan keuangan dan BMD di masing-masing PD belum optimal".

"Human error memang masih sering terjadi, apalagi kalau ada pegawai baru atau pergantian staf di OPD. Mereka butuh waktu untuk benar-benar paham sistemnya." – Informan 1 (Staf Akuntansi).

Selain itu, pada periode puncak pelaporan, seperti akhir triwulan dan akhir tahun anggaran, sistem mengalami perlambatan akibat tingginya volume transaksi yang diproses secara bersamaan. Kondisi ini berdampak pada efisiensi kerja dan ketepatan waktu pelaporan. Kendala ini menunjukkan perlunya peningkatan kapasitas infrastruktur sistem untuk mengantisipasi lonjakan beban kerja.

"Kalau akhir tahun atau akhir triwulan, sistemnya suka lambat karena semua OPD input bersamaan" – Informan 2 (Pengolah Data Perbendaharaan).

Dari sisi integrasi sistem, belum terhubungnya SIKSDA secara penuh dengan Sistem Informasi Manajemen Barang Milik Daerah (SIM BMD) masih menjadi kendala yang cukup signifikan dalam pelaksanaan pengelolaan data aset daerah. Kondisi ini menyebabkan terjadinya duplikasi input data karena beberapa informasi harus dimasukkan secara terpisah ke dalam masing-masing sistem. Selain itu, proses rekonsiliasi data masih dilakukan secara manual setiap triwulan untuk memastikan kesesuaian informasi antar sistem. Proses tersebut tidak hanya memerlukan waktu dan tenaga tambahan, tetapi juga berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian data apabila tidak dilakukan secara teliti. Oleh sebab itu, integrasi antara SIKSDA dan SIM BMD terus diupayakan guna menciptakan pengelolaan data yang lebih efektif, efisien, dan terintegrasi. Upaya pengembangan ini juga telah ditetapkan sebagai salah satu prioritas dalam rencana strategis BPKAD ke depan.

Selain kendala internal tersebut, terdapat pula faktor eksternal yang menjadi tantangan dalam implementasi SIKSDA, yaitu ketergantungan terhadap jaringan internet dan ancaman keamanan siber. Sebagai sistem berbasis web, operasional SIKSDA sangat bergantung pada kestabilan koneksi internet. Apabila terjadi gangguan jaringan, maka akses terhadap sistem dapat terhambat sehingga mempengaruhi proses penginputan, pengelolaan, maupun pemantauan data. Di sisi lain, meningkatnya risiko ancaman keamanan siber juga menjadi perhatian penting karena sistem menyimpan data dan informasi pemerintahan yang bersifat strategis. Oleh karena itu, diperlukan penguatan

keamanan sistem secara berkelanjutan, baik melalui peningkatan proteksi data, pengawasan akses pengguna, maupun pembaruan sistem keamanan agar kerahasiaan dan integritas data tetap terjaga.

Untuk merespons berbagai kendala tersebut, BPKAD Kabupaten Sidoarjo telah melakukan sejumlah upaya penanganan yang bersifat adaptif dan berkelanjutan sebagaimana ditunjukkan dalam tabel berikut.

Tabel 4. Bentuk Adaptasi SIKSDA dalam Pengelolaan Keuangan Daerah di BPKAD Kabupaten Sidoarjo

No	Bentuk Adaptasi	Tahun	Keterangan
1	Pengembangan SIKSDA versi desktop	2017	Sistem awal berbasis desktop untuk digitalisasi keuangan daerah
2	Integrasi dengan Bank Jatim (<i>real-time</i>)	2018	Pencairan dana langsung dari sistem secara otomatis
3	Sosialisasi Non Tunai	2018	Diikuti 49 OPD, dilaksanakan di Prigen
4	Migrasi ke versi web	2020	Peningkatan aksesibilitas dan integrasi antarunit
5	Penerapan fitur <i>Paperless</i>	2022	Minimalisasi dokumen fisik dalam transaksi keuangan
6	Bimbingan Teknis <i>Paperless</i>	2022	Diikuti 49 OPD termasuk admin kecamatan, dilaksanakan di Batu
7	Integrasi BSrE (tanda tangan elektronik)	2024	Diterapkan pada dokumen SPM dan SP2D
8	Otomatisasi CaLK	2024	Penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan secara otomatis
9	Penerapan <i>backup</i> data harian	2024	Mitigasi risiko kehilangan data akibat gangguan sistem
10	Penghargaan Top Ten Inotek Awards	2024	Kategori Inovasi Daerah dari Gubernur Jawa Timur
11	Rencana integrasi SIMGAJI	Akan datang	Pencairan TPP dan Tukin tanpa perhitungan manual
12	Rencana pembuatan VA dan QRIS	Akan datang	Memudahkan identifikasi <i>coring</i> pendapatan daerah

(Sumber: LKJIP BPKAD Kabupaten Sidoarjo, 2024, diolah)

Berdasarkan Tabel 4, terlihat bahwa upaya adaptasi BPKAD dilakukan secara reaktif maupun proaktif dalam mendukung efektivitas implementasi SIKSDA. Secara reaktif, BPKAD merespons kendala SDM melalui bimbingan teknis dan pendampingan kepada OPD, meningkatkan keamanan sistem dengan backup data harian, serta terus mengupayakan integrasi SIKSDA dengan SIM BMD. Sementara itu, secara proaktif BPKAD merencanakan integrasi dengan aplikasi SIMGAJI untuk pencairan TPP dan Tukin, serta pengembangan fitur VA dan QRIS guna memudahkan identifikasi pendapatan daerah. Komitmen adaptasi tersebut juga mendapat pengakuan eksternal melalui penghargaan Top Ten Inotek Awards Kategori Inovasi Daerah dari Gubernur Jawa Timur tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa BPKAD tidak hanya berfokus pada pengembangan teknis sistem, tetapi juga pada peningkatan kualitas SDM dan tata kelola organisasi secara menyeluruh, sehingga sejalan dengan dimensi adaptasi dalam teori efektivitas organisasi Steers.

Dalam dimensi adaptasi, hasil penelitian menunjukkan bahwa BPKAD Kabupaten Sidoarjo mampu menunjukkan respons yang cukup cepat dan adaptif terhadap perubahan lingkungan eksternal melalui penyesuaian sistem SIKSDA. Hal ini terlihat dari adanya pembaruan sistem secara berkala sesuai regulasi terbaru, pelatihan rutin bagi pengguna, serta penerapan *backup* data harian sebagai langkah mitigasi terhadap potensi risiko kehilangan data.

Temuan ini memiliki kesamaan dengan penelitian Pramudio dan Choiriyah (2022), terutama pada kendala keterbatasan kemampuan SDM dalam beradaptasi dengan pembaruan sistem serta gangguan teknis seperti error aplikasi dan ketidakstabilan server. Perbedaannya, BPKAD Kabupaten Sidoarjo menunjukkan mekanisme adaptasi yang lebih terstruktur melalui bimbingan teknis berkala, evaluasi internal mingguan, dan pengembangan sistem berkelanjutan, sedangkan kendala pada implementasi SISKEUDES di Desa Kebonagung belum sepenuhnya teratasi. Kondisi ini juga berbeda dengan implementasi SIPD di Kota Denpasar dan Kota Bekasi yang menunjukkan lemahnya aspek adaptasi akibat kurangnya pelatihan berkelanjutan, lambatnya respons pemerintah pusat, serta keterbatasan infrastruktur dan fitur sistem. Dengan demikian, SIKSDA di Kabupaten Sidoarjo dapat dikategorikan memiliki tingkat adaptasi yang lebih baik dibandingkan sistem informasi keuangan daerah lain, meskipun masih memerlukan penyempurnaan pada aspek infrastruktur, integrasi sistem, dan pemerataan kapasitas SDM. Temuan ini sejalan dengan dimensi adaptasi dalam teori efektivitas organisasi Steers yang menekankan pentingnya fleksibilitas dan responsivitas organisasi terhadap dinamika internal maupun eksternal.

V. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, implementasi Sistem Informasi Keuangan Sidoarjo (SIKSDA) di BPKAD Kabupaten Sidoarjo secara umum telah berjalan efektif dalam mendukung pengelolaan keuangan daerah. Efektivitas tersebut terlihat dari meningkatnya efisiensi, akurasi, dan akuntabilitas proses perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan keuangan daerah. Pada dimensi pencapaian tujuan, SIKSDA mampu mendukung optimalisasi pengelolaan keuangan melalui realisasi anggaran yang tinggi, laporan keuangan OPD yang sesuai standar, serta pendokumentasian aset yang melampaui target. Selain itu, sistem juga telah terintegrasi dengan beberapa layanan pendukung sehingga membantu sinkronisasi data dan efisiensi administrasi, meskipun integrasi penuh dengan SIM BMD masih belum optimal.

Pada dimensi adaptasi, BPKAD Kabupaten Sidoarjo menunjukkan kemampuan yang baik dalam merespons perubahan dan kendala teknis melalui pembaruan sistem, pelatihan pengguna, backup data, serta evaluasi rutin. Walaupun masih terdapat hambatan seperti perlambatan sistem saat periode pelaporan, kesalahan input data, dan ketergantungan jaringan internet, kendala tersebut masih dapat diatasi melalui koordinasi dan prosedur internal yang adaptif. Secara keseluruhan, efektivitas implementasi SIKSDA didukung oleh kesiapan teknologi, komitmen kelembagaan, dan pengembangan SDM yang berkelanjutan. Namun, optimalisasi masih diperlukan terutama pada integrasi sistem, stabilitas server saat peak season, serta penguatan infrastruktur dan keamanan siber. Dengan capaian tersebut, SIKSDA dapat dipandang sebagai praktik baik (best practice) dalam implementasi sistem informasi keuangan daerah yang efektif dan adaptif. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa transformasi digital pengelolaan keuangan daerah memerlukan dukungan teknologi, manajemen, pengembangan SDM, serta kemampuan beradaptasi terhadap kebutuhan pengguna. Ke depan, optimalisasi perlu difokuskan pada percepatan integrasi penuh dengan SIM BMD serta penguatan infrastruktur sistem agar lebih stabil pada periode puncak pelaporan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga artikel ini dapat terselesaikan. Penulis mengucapkan terima kasih kepada BPKAD Kabupaten Sidoarjo atas keterbukaan akses informasi selama penelitian, kepada dosen pembimbing atas kesabaran dan arahan yang diberikan, serta kepada dosen penguji atas masukan konstruktif yang memperkaya tulisan ini. Terima kasih kepada kedua orang tua dan keluarga atas doa dan dukungan yang tidak pernah putus, serta kepada rekan-rekan mahasiswa atas kebersamaan dan semangat yang selalu dibagikan. Terakhir, terima kasih untuk diri sendiri yang telah memilih untuk terus bertahan dan menyelesaikan apa yang telah dimulai.

REFERENSI

- [1] M. Hasyim, "Prinsip Otonomi Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Pasca Berlakunya Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Standar Harga Satuan Regional," *Mimb. Keadilan*, vol. 14, no. 1, pp. 95–106, 2021, doi: 10.30996/mk.v14i1.4665.
- [2] L. T. J. Fitria Wahida, Animah, "Pelaksanaan dan Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Sekretariat Daerah Kota Mataram," *Akbis Media Ris. Akunt. dan Bisnis*, vol. 6, no. 1, p. 20, 2022, doi: 10.35308/akbis.v6i1.5265.
- [3] B. P. Manohara, I. Nurdin, and M. B. Z. Tjenreng, "Optimasi TIK di Sektor Keuangan dan Ekonomi, Studi Kasus Kabupaten Banyuwangi," *Arus J. Sos. dan Hum.*, vol. 5, no. 1, pp. 232–239, 2025, doi: 10.57250/ajsh.v5i1.1015.
- [4] N. H. Fitri Zahwatul Aulia, "Peran Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Dalam Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah," *J. Ilmu dan Ris.*, 2024, [Online]. Available: <http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/5821%0Ahttp://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/download/5821/5866>
- [5] C. M. J. Gultom and S. N. Harahap, "Implementasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada Penyusunan Laporan Keuangan Satuan Kerja Pemerintah," *Owner*, vol. 8, no. 1, pp. 300–313, 2024, doi: 10.33395/owner.v8i1.1846.
- [6] E. I. Rahayu, "Efektivitas Kinerja Divisi Strategic Sourcing Barang Information and Technology (IT), Information and System (IS), dan Peralatan Perkasan Bank Indonesia dalam Menerapkan Work From Home (WFH) pada Masa Pandemi Covid-19 Tahun 2020–2021," *Galang Tanjung*, vol. 2019, no. 2504, pp. 1–9, 2022.
- [7] H. Lathifah, A. Frinaldi, and N. Eka Putri, "Analisis Akuntabilitas Birokrasi Publik Dalam Sistem Keuangan Daerah Dan Dampaknya Terhadap Kinerja Pelayanan Publik," *J. Prof.*, vol. 11, no. 2, pp. 585–592, 2024.
- [8] Magdalena Y. Devinci, Yosefina Andia Dekrita, and Magdalena Silawati Samsir, "Analisis Efisiensi Dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah Di Kabupaten Sikka," *J. Projemen UNIPA*, vol. 9, no. 2, pp. 51–70, 2023, doi: 10.59603/projemen.v9i2.44.

- [9] T. Taufiqurrohman and I. Puspita, "Pengaruh Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Bimbingan Teknis Keuangan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak," *J. Stud. Akunt. dan Bisnis (The Indones. J. Manag. Accounting)*, vol. 8, no. 2, p. 155, 2020, doi: 10.55171/jsab.v8i2.594.
- [10] D. M. Rosyidah, "Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kota Sukabumi)," *J. Multidisiplin West Sci.*, vol. 2, no. 08, pp. 615–635, 2023, doi: 10.58812/jmws.v2i08.566.
- [11] S. D. Irfianto and D. A. Utami, "Effectiveness Of Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) In Gresik Regency," *J. Mhs. Unesa*, vol. 1, no. 2, 2013, [Online]. Available: <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/publika/article/view/2600>
- [12] I. K. A. Teken and A. Romarina, "Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Denpasar," *J. Terap. Pemerintah. Minangkabau*, vol. 4, no. 2, pp. 111–123, 2024, doi: 10.33701/jtpm.v4i2.4419.
- [13] Y. F. H. Firdaus and M. A. Cholik, "Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Bekasi," *Reformasi Adm.*, vol. 11, no. 1, pp. 68–78, 2024, doi: 10.31334/reformasi.v11i1.4073.
- [14] Pramudio, I. E. H., and Choiriyah, I. U. "Efektivitas Sistem Keuangan Desa dalam Perwujudan E-Government di Desa Kebonagung Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo," *Journal Publicho*, 8(2), 703-718, 2025
- [15] S. D. Indarsari, "Penerapan Sistem Informasi Manajemen Gaji (Simgaji) Di Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Pemerintah Kota Bontang," *J. Paradig.*, vol. 12, no. 1, 2023, doi: 10.30872/jp.v12i1.11631.
- [16] Y. Adelia Sakinah Rahmah, "Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Sumatera Utara Berbasis Website," *Djtechno J. Teknol. Inf.*, vol. 5, no. 1, pp. 12–31, 2024, doi: 10.46576/djtechno.
- [17] Jailani, Syahrani, Jeka, and Firdaus, "Populasi dan Sampling (Kuantitatif), Serta Pemilihan Informan Kunci (Kualitatif) dalam Pendekatan Praktis," *J. Pendidik. Tambusai*, vol. 7, no. 3, pp. 26320–26332, 2023.
- [18] L. Hidayah, R. R. Setiawan, and D. L. Fithri, "Inovasi Sistem Informasi Pemasaran Dan Pemesanan Kavling Berbasis Web Untuk Pengembangan Residence Jaya Kudus," vol. 5, no. 1, 2025.
- [19] D. Nadaa and E. Priyanti, "Inovasi Digital dalam Pelaksanaan Penggunaan Aplikasi SISKEUDES," *Matra Pembaruan*, vol. 7, no. 1, pp. 61–73, 2023, doi: 10.21787/mp.7.1.2023.61-73.
- [20] Q. Qomaruddin and H. Sa'diyah, "Kajian Teoritis tentang Teknik Analisis Data dalam Penelitian Kualitatif: Perspektif Spradley, Miles dan Huberman," *J. Manag. Accounting. Adm.*, vol. 1, no. 2, pp. 77–84, 2024, doi: 10.52620/jomaa.v1i2.93.

Conflict of Interest Statement:

The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.

Artikel Ilmiah Wiwik Anggraeni (2).pdf

ORIGINALITY REPORT

18%

SIMILARITY INDEX

18%

INTERNET SOURCES

16%

PUBLICATIONS

14%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	Submitted to Exeed College Student Paper	11%
2	bpkad.sidoarjokab.go.id Internet Source	3%
3	ejournal.ipdn.ac.id Internet Source	1%
4	archive.umsida.ac.id Internet Source	1%
5	loddosinstitute.org Internet Source	1%
6	Submitted to Universitas Muhammadiyah Sidoarjo Student Paper	1%
7	ejurnal.lkpkaryaprima.id Internet Source	1%

Exclude quotes Off

Exclude matches < 1%

Exclude bibliography Off